

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gaffar, A. (2012). *Politik Indonesia : Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPU Provinsi Jawa Barat. (2024). *Berita acara daftar pemilih tetap Pilkada 2024*
- Lubis, M. A, dan Frensh, W. (2023). *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*. CV Eureka Medua Aksara.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku pintar pemilu dan demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 174.
- Rahadi Budi Prayitnodan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish 2023), hlm 4
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., ... & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sholahuddin, A. H., et al. (2023). *Hukum pemilu di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi hukum pelanggaran administrasi pemilu*. Konstitusi Press.
- Suryana, C. Siddiq, M. S., Umam, M. N., Assiddiq, M., Adawiyah, N., & Risalah, N. A. (2022). *Demokrasi politik Indonesia*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. ISBN 978-632-88160-5-7.
- Syeila, R. *Buku Saku Penangan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur*. (Belitung Timur: Bawaslu Kabupaten Belitung Timur), 2024.

Jurnal

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161.
- Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S. (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 254-261.
- Arifianto, M. H., Hamdi, M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(1), 149-215.

- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 528-539.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Firdaus, A., & Fais, M. (2024). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Ginanjari, D., Hanifah, F., & Huda, U. N. (2020). Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 21-30.
- Hasugian, M. (2024). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92-100.
- Mone, E. W., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Problematika Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Tertutup dari Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(05), 1-7.
- Novarizal, S., Sibuea, H. P., & Saputra, R. (2024). Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(1), 107-130.
- Panala, O. R. (2021). PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA 2021-2024 (STUDI TENTANG PENGAWASAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19).
- Prayinto, S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. *Electoral Research*, 1(1), 1-18.
- Ranbilal, R., Seran, G. G., & Hermawa, D. (2024). Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4484-4496.
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107-136.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17-25.

- Siregar, M. A., Nasution, M., Ikhsan, E., & Afnila, A. (2023). KEWENANGAN BADAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELALUI SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN PENGAWASAN PEMILU DI SUMUT. *Law Jurnal*, 3(2), 194-208.
- Suparno, S. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya. *Mimbar Administrasi*, 15(1), 1-8.
- Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137-142.
- Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Syahpira, D. D., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., ... & El Zuhra, F. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 1-22.
- Zuhroh, S. (2020). Penguatan peran Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6 (2), 112-113.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Karya Ilmiah

Fadhila, Y. C. (2019). *Peran KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas (studi deskriptif KPU Kota Cimahi dalam sosialisasi Pilgub Jabar 2018)* (Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia).